



# GAPKI

## NEWS



# MITIGASI

## ANCAMAN KARHUTLA

# Mencegah Lebih Baik

## Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena buletin *GAPKI News* edisi Juli 2025 akhirnya sampai ke tangan pembaca. Semuanya tidak lepas dari karunia dari Tuhan yang merestui kami menyelesaikan penerbitan media kita tercinta ini.

Banyak peristiwa menarik dalam dua bulan belakangan ini yang terjadi di industri sawit yang membuat kita harus berpikir semakin jernih dan tenang. Tantangan datang silih berganti, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor yang membuat kita khawatir daya saing sawit di pasar global menurun. Apalagi kondisi geopolitik yang kurang kondusif membuat kita harus lebih waspada.

Langkah cepat Satgas PKH di sejumlah daerah penghasil sawit tentunya membuat banyak orang terkejut. Apalagi ketentuan diterbitkan pemerintah yang membuat pelaku industri sawit lebih cermat dalam bertindak dan melangkah. Ditambah lagi, sertifikasi ISPO terbaru yang tidak hanya mencakup sektor hulu, namun juga merambah sektor hilir dan bioenergi. Ini tantangan besar yang harus kita respon secara bijak untuk kebaikan ke depan.

Namun, dari banyak tantangan yang kita hadapi, ada satu hal yang menuntut kewaspadaan tinggi pelaku bisnis sawit. Musim kemarau, meski disertai hujan di beberapa daerah, tetap menyimpan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Mencegah kebakaran tentu lebih baik. Karena itu, GAPKI menyiapkan mitigasi untuk merespon potensi ancaman ini sebagai laporan utama dalam penerbitan edisi Juli 2025 ini.

Peristiwa lain dari berbagai lokasi menjadi bagian tak terpisahkan dari publikasi kegiatan GAPKI di buletin ini. Harapan kami, setiap artikel dapat menambah informasi dan memberi kita insight yang lebih baik bagaimana melangkah ke depan. Selamat membaca. ■

Salam,  
Redaksi GAPKINews

## GAPKINews

Media Komunikasi dan  
Informasi Anggota GAPKI

**PENERBIT**  
GAPKI Pusat

**PEMBINA**  
Eddy Martono  
Sany Anthony  
Susanto Yang  
Satrija B. Wibawa  
M. Hadi Sugeng  
Mona Surya

**PENGARAH**  
Mukti Sardjono

**TIM AHLI**  
Para Ketua Bidang  
Pengurus Pusat GAPKI

**PENANGGUNG JAWAB**  
Fenny Sofyan

**Dewan Redaksi**  
Yudha Negara Nyoman  
Indah Permata Soegyarto  
Ratri Melanda Maharani  
Dyah Laras Wulandari  
Susan Sri Rahayu  
Eko Tamba

**ALAMAT**  
Kantor GAPKI Pusat  
Sudirman Park Blok B-18  
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35  
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871  
gapki@gapki.id | gapkipusat@  
yahoo.com



Ceria Bersama Anak-Anak Kebun Sawit..... 18

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Salam Redaksi.....                                           | 2     |
| Daftar Isi.....                                              | 3     |
| Langkah Tepat GAPKI Cegah Karhutla.....                      | 4,5   |
| Pemerintah Apresiasi GAPKI Antisipasi Karhutla.....          | 6     |
| Ekspor Menurun, Persediaan Naik.....                         | 7     |
| Memperkuat Posisi Sawit di Kancan Global.....                | 8     |
| Refleksi Hari Buruh Soroti Ketidakpastian Hukum.....         | 9     |
| Tahun Sulit Industri Sawit.....                              | 10,11 |
| Sawit Indonesia dan Malaysia Punya Problem Serupa.....       | 12    |
| Kolaborasi GAPKI-SPKS Dorong Kemandirian Ekonomi Petani..... | 13    |
| GAPKI Beri Masukan Buku Sawit Terbitan Lemhannas.....        | 14    |
| GAPKI dan Tanzania Kembangkan Serangga Penyerbuk Sawit.....  | 15    |



Dedikasi Sawit Tanpa Pekerja Anak, GAPKI Raih PAACLA Award 2025..... 16



CPOPC-GAPKI Perkuat Posisi Global Minyak Sawit..... 17

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| GAPKI Jambi Siap Transformasi Industri Sawit.....   | 19    |
| Pungutan Ekspor Naik, Daya Saing Turun.....         | 20,21 |
| Kontribusi GAPKI pada Penurunan Emisi GRK.....      | 22    |
| GAPKI Usulkan Pelaksanaan Komite ISPO.....          | 23    |
| Gubernur Minta GAPKI Kalbar Tingkatkan Sinergi..... | 24    |

# LANGKAH TEPAT GAPKI CEGAH KARHUTLA

*Dari 15 provinsi,  
8 di antaranya provinsi  
dengan kerentanan  
tinggi terhadap  
karhutla.*

**K**ebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selalu mengintai berbagai daerah di Indonesia setiap musim kemarau tiba. Potensi ancaman ini tidak hanya mengintai daerah padat penduduk di perkotaan, namun juga kawasan hutan hingga perkebunan. Tidak terucali perkebunan sawit yang tersebar di berbagai provinsi di Tanah Air. Karena itu, mitigasi pencegahan dirancang sejak dini agar bencana ini dapat dicegah dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi karhutla dapat ditekan seminim mungkin.

Untuk memitigasi ancaman karhutla pada musim kemarau 2025 ini, GAPKI bergerak cepat melalui koordinasi dengan pemerintah dalam program *Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla*. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang didampingi Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng mengadakan kunjungan ke berbagai daerah untuk sosialisasi program sekaligus mengecek persiapan pemerintah daerah maupun perusahaan.

Sepanjang Mei 2025, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq bersama GAPKI memantau persiapan pencegahan karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Babel.

Secara historis terdapat 15 provinsi yang punya potensi karhutla skala besar. Pemerintah daerah dan GAPKI diminta terus meningkatkan konsolidasi dan memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk pencegahan karhutla.

Untuk mitigasi ancaman karhutla ke depan, Menteri Hanif Faisol Nurofiq minta perusahaan sawit di Indonesia menjadi anggota GAPKI supaya berkoordinasi dan berkonsolidasi lebih intensif. Saat ini, 752 perusahaan anggota GAPKI dipastikan telah



mematuhi regulasi terkait karhutla dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan dalam kondisi siap siaga. Hal ini ditegaskan oleh Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng yang mendampingi Menteri Hanif dalam kunjungan ke provinsi penghasil sawit di Indonesia.

Menurut M. Hadi Sugeng, anggota GAPKI telah mematuhi seluruh regulasi yang berkaitan dengan kondisi terkini seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kepatuhan terhadap regulasi dilakukan dengan langkah konkret dan kolaboratif karena pencegahan karhutla serta pengelolaan risikonya tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri.

Dalam Rapat *Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla* di SKA CoEx Pekanbaru pada 10 Mei 2025, M. Hadi Sugeng menjelaskan 752 perusahaan anggota GAPKI tersebar di 15 provinsi dengan luasan 3,7 juta hektar.

Delapan di antaranya yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara tercatat sebagai wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap karhutla. “Secara rutin kami kirim surat edaran untuk mengingatkan kondisi ini,” katanya.

Untuk mitigasi yang tepat sasaran, GAPKI telah memetakan titik-titik rawan kebakaran, baik di dalam area konsesi, lahan yang tidak produktif, hingga wilayah yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.

Untuk lahan dengan risiko tinggi, upaya pencegahan dilakukan dengan

penyediaan sarana air dan penerapan teknik pembasahan ulang (*rewetting*) guna menjaga kelembaban lahan gambut.

Selain kesiapan peralatan pemadam, masyarakat dilibatkan melalui penyuluhan, simulasi karhutla, pelatihan bersama Manggala Agni, hingga pembentukan komunitas peduli api di sekitar wilayah operasional perusahaan. GAPKI juga mengadopsi pendekatan berbasis lanskap yang menekankan kolaborasi lintas sektor seperti patroli terpadu yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan hingga modifikasi cuaca untuk mencegah karhutla.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menegaskan anggota GAPKI sudah mengikuti berbagai regulasi yang berlaku, khususnya terkait pencegahan kebakaran.

Salah satunya adalah tidak ada lagi pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran. GAPKI melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran karena apabila kebakaran terjadi di dalam atau di sekitar areal kebun, perusahaan bisa dikenai sanksi hukum berat.

GAPKI tentu sangat serius dalam mencegah karhutla karena kebakaran memicu dampak lain yang tidak kalah merugikan. Selain potensi terkena sanksi hukum, karhutla di dalam atau sekitar kebun sangat merugikan perusahaan secara bisnis.

Salah satunya produktivitas kebun menurun drastis apabila terjadi kebakaran. Kerusakan lingkungan juga tidak dapat dihindari sebagai kerugian lain yang dialami perusahaan.

Prediksi kondisi kemarau tahun ini disampaikan oleh Menteri LH Hanif Faisol berdasarkan analisis BMKG. Jumlah titik panas (*hotspot*) sepanjang tahun 2025 menurun drastis sebesar 80 persen dibandingkan tahun 2024.

Dalam 2015–2024, kebakaran melanda 42 ribu hektar lahan sawit. Tahun ini, data dari satelit NASA menunjukkan ada 142 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. “Ancaman kebakaran belum sepenuhnya hilang,” kata Menteri Hanif.

Penurunan titik panas tahun ini tidak lepas dari terjadinya musim



kemarau basah. Meskipun musim kemarau sudah datang, namun hujan masih turun di daerah yang selama ini menjadi titik krusial karhutla seperti di Riau, Sulsel, Jambi, Kalbar, Kalteng,

dan Kalsel. Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng menegaskan GAPKI terus bersiaga mengantisipasi ancaman dan potensi karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. ■

## RISIKO KARHUTLA

BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 terjadi bertahap mulai akhir April hingga Juni dan puncaknya pada Juni-Agustus. Sebanyak 60% wilayah didominasi kondisi normal, 26% wilayah didominasi kemarau lebih basah dan 14% kemarau lebih kering.

### April-Mei 2025

Risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT menunjukkan risiko menengah hingga tinggi.

### Juni 2025

Peningkatan signifikan risiko karhutla di Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatera Utara, Jambi, dan sekitarnya.

### Juli-September 2025

Risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Potensi risiko tertinggi di bulan Oktober 2025 di wilayah NTT, NTB, Papua Selatan, Kalsel dan Bangka Belitung.



# PEMERINTAH APRESIASI GAPKI ANTISIPASI KARHUTLA

***Menteri LH meminta perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan pencegahan karhutla.***

**M**enteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi kepada GAPKI yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Koordinasi dilakukan bersama belasan Gubernur, terutama di provinsi penghasil sawit yang termasuk rawan karhutla seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

“Terkait penanggulangan karhutla maka kepada kita semua pemilik konsesi diminta untuk serius bertanggung jawab terhadap area kerjanya,” kata Menteri LH Hanif di Jakarta pada Mei 2025. Pencegahan harus menjadi prioritas sesuai amanat undang-undang. Apalagi berdasarkan pengalaman 2015-2024, kebakaran hutan dan lahan mencakup area seluas 42 ribu hektar lahan perkebunan yang dikelola 79 perusahaan. “Ini jangan terulang,” katanya.



Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan siap mengomando pencegahan karhutla di Riau bersama GAPKI dan elemen lainnya. Bahkan, sosialisasi pencegahan karhutla dilakukan dengan *Fun Run* se-Riau dan Jambore Karhutla. Sebagai provinsi utama penghasil sawit, Riau sangat berkepentingan mencegah terjadinya karhutla yang dapat memicu kerugian sosial dan ekonomi sekaligus.

Dukungan terbuka pencegahan karhutla juga datang dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiari Sabran, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia. Gubernur Herman Deru menegaskan perubahan kesadaran masyarakat yang kini mulai meninggalkan tradisi membakar lahan. Karena itu, pemerintah daerah harus menyediakan solusi berupa alat pembuka lahan tanpa bakar seperti traktor.

“Kami sudah menyediakan alsintan dengan sistem sewa yang murah

untuk daerah rawan kebakaran,” kata Herman Deru yang didampingi Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Data sebelumnya mencatat mayoritas kebakaran terjadi di lahan terbengkalai akibat izin yang habis atau HGU yang tidak produktif. “Ini yang perlu kita carikan solusi bersama,” katanya.

Kolaborasi dan koordinasi pemerintah dengan GAPKI ini diharapkan dapat menekan dampak negatif bencana karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sejak tahun 2022 hingga saat ini kerugian negara akibat karhutla mencapai Rp 18 triliun.

Kerugian lain tentunya dari aspek sosial dan lingkungan yang nilainya bisa semakin besar. Karena itu, Menteri LH Hanif Faisol meminta perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan koordinasi dalam pencegahan karhutla. ■



## EKSPOR MENURUN, PERSEDIAAN NAIK



**Kenaikan produksi dibandingkan sebelumnya terjadi karena faktor musiman.**

**P**roduksi CPO pada April 2025 naik 2% menjadi 4.479 ribu ton dari 4.391 ribu ton dibanding bulan sebelumnya karena faktor musiman. Begitu juga dengan produksi PKO naik menjadi 425 ribu ton dari 417 ribu ton. Secara YoY sampai April 2025, produksi CPO dan PKO tahun 2025 mencapai 18.039 ribu ton atau lebih tinggi 0,85% dibandingkan produksi tahun 2024.

Sejalan dengan kenaikan produksi, konsumsi dalam negeri turun dari 2.168 ribu ton pada Maret 2025 menjadi 2.100 ribu ton pada April 2025. Konsumsi untuk pangan pada April turun 2,02% menjadi 871 ribu ton dibandingkan Maret sebesar 889 ribu ton. Konsumsi oleokimia naik 0,32% menjadi 183 ribu ton dari bulan sebelumnya yakni 182 ribu ton.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan penurunan juga terjadi pada konsumsi biodiesel dari 1.097 ribu ton pada Maret menjadi 1.046 ribu ton pada April. Ekspor produk sawit pada April turun 39,2% menjadi 1.779 ribu ton dari ekspor bulan sebelumnya sebesar 2.876 ribu ton. Penurunan ekspor terbesar terjadi pada produk minyak sawit olahan dari 2.128 ribu ton menjadi 1.241 ribu ton.

Ekspor oleokimia juga turun 9,6% dari 407 ribu ton menjadi 368 ribu ton. Berdasarkan negara tujuan

ekspor, nominal penurunan ekspor yang besar terjadi pada April untuk tujuan Uni Eropa (-156 ribu ton), India (-155 ribu ton), USA (-113 ribu ton), Pakistan (-109 ribu ton), Bangladesh (-86 ribu ton).

Secara tahunan sampai April 2025, ekspor turun dari 9.715 ribu ton tahun 2024 menjadi 9.416 ribu ton pada 2025. Penurunan terbesar terjadi untuk tujuan India (-1.055 ribu ton/-68%), Uni Eropa (-818 ribu ton/-62%), China (-746 ribu ton/-62%), dan Pakistan (-385 ribu ton/-42%).

Nilai ekspor produk sawit pada April 2025 turun dari US\$ 3,283 miliar pada Maret menjadi US\$ 2,069 miliar. Meskipun demikian, nilai ekspor Januari-April 2025 mengalami kenaikan sebesar 30,2% dari US\$ 8,307 miliar pada 2024

menjadi US\$ 10,818 miliar pada 2025. Hal ini disebabkan oleh harga rata-rata produk CPO meningkat pada Januari-April 2025 sebesar US\$ 1.183/ton Cif Rotterdam. Harga ini lebih tinggi daripada rata-rata harga Januari-April 2024 sebesar US\$ 1.001/ton Cif Rotterdam.

Dengan stok awal April 2025 sebesar 2.017 ribu ton, produksi CPO dan PKO naik menjadi 4.904 ribu ton. Sedangkan konsumsi dalam negeri turun menjadi 2.100 ribu ton dan ekspor turun menjadi 1.779 ribu ton. Dengan demikian persediaan pada akhir April naik menjadi 3.046 ribu ton. ■



## MEMPERKUAT POSISI SAWIT DI KANCAH GLOBAL

***Kolaborasi berbasis riset, advokasi, dan komunikasi dibutuhkan untuk kebijakan dan praktik industri yang berdaya saing global.***

Sebagai produk dengan kontribusi dan potensi ekonomi sangat besar, komoditas sawit perlu ditempatkan di titik yang seharusnya dalam pandangan global. *Positioning* dan peningkatan citra ini harus dilakukan secara strategis supaya dampak positifnya berkelanjutan. Karena itu, GAPKI menggandeng *Indonesian Palm Oil Strategic Studies* (IPOSS) untuk memperkuat posisi dan citra industri sawit Indonesia di kancah global.

Kolaborasi GAPKI dan IPOSS dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Pengurus IPOSS Nanang Hendarsah di Jakarta pada 17 Juni 2025. Kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini meliputi

tiga area krusial, yakni pengembangan basis data industri sawit, strategi komunikasi industri, serta riset dan advokasi kebijakan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan sinergi lintas lembaga dalam menghadapi isu-isu global harus dilakukan oleh industri sawit. IPOSS dipilih karena memiliki rekam jejak panjang dan berpengalaman sebagai lembaga kajian strategis dengan kapasitas penelitian, advokasi, dan komunikasi. Rekam jejak ini sebagai alasan IPOSS digandeng menjadi mitra strategis GAPKI. Bersama IPOSS, peningkatan posisi dan citra positif industri sawit dilakukan di dalam maupun di luar negeri.

Sinergi dengan IPOSS diyakini oleh GAPKI dapat berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia petani, serta fasilitasi kemitraan usaha perkebunan sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan posisi dan citra yang bagus diharapkan industri sawit terus menjadi motor penggerak ekonomi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah

sentra produksi sawit.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, kolaborasi ini menjadi langkah proaktif dalam membangun narasi positif dan berbasis data yang kuat untuk membela sawit di mata dunia. Sebab, serangan dan kampanye negatif terhadap industri sawit berlangsung masif dengan berbagai saluran komunikasi dan beragam kepentingan di belakangnya. Penguatan posisi dan citra industri sawit sudah saatnya dilakukan dengan lebih sistematis.

Ketua Pengurus IPOSS, Nanang Hendarsah mengapresiasi GAPKI. Posisi dan citra industri sawit harus terus dibangun karena komoditas unggulan Indonesia ini menghadapi tantangan yang tidak ringan antara lain EUDR, hilirisasi, dan lainnya. Karena itu, kolaborasi berbasis riset, advokasi, dan komunikasi sangat dibutuhkan di masa sekarang untuk menghadirkan kebijakan dan praktik industri yang kuat, tangguh, dan berdaya saing global. ■





## REFLEKSI HARI BURUH SOROTI KETIDAKPASTIAN HUKUM

*Sangat disayangkan jika penyitaan lahan menimpa lahan petani yang mendapat lahan itu dari pemerintah melalui program transmigrasi.*

**P**elaku usaha perkebunan kelapa sawit meminta pemerintah memberikan kepastian hukum, terutama tentang lahan, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Apalagi industri sawit adalah industri besar yang berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih dalam *Refleksi Hari Buruh 2025* dengan tema *Ekonomi Terhimpit, Buruh Menjerit* di Gedung PBNU di Jakarta pada 1 Mei 2025.

Selain menghadirkan dunia usaha, refleksi hari buru yang diselenggarakan oleh PBNU ini juga menghadirkan Presiden DPP Konfederasi Serikat Butuh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin. Ketidakpastian hukum di industri sawit yang terjadi belakangan menjadi pembahasan karena berdampak terhadap nasib pekerja di sektor sawit. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Sumarjono Saragih, industri sawit yang besar sudah seharusnya diurus dengan cara yang besar dalam makna yang luas. Sebab, industri ini menyerap puluhan juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Sedangkan jumlah petani sawit saja mencapai 16 juta orang. Karena itu, sangat disayangkan jika penyitaan lahan menimpa lahan petani yang mendapat lahan itu dari pemerintah melalui program transmigrasi, misalnya.

Sumarjono Saragih mengatakan GAPKI mendukung penuh tata kelola sawit berkelanjutan yang dijalankan dengan prinsip keadilan. Penyelesaian masalah hukum diharapkan tidak mengganggu operasional sektor industri yang menjadi andalan ekspor nonmigas Indonesia ini. Selain itu, penyelesaian masalah hukum tidak diharapkan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap nasib pekerja.

Sementara itu, Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin mengatakan saat ini komoditas



ekspor Indonesia tengah mengalami penurunan, termasuk sektor kelapa sawit. Padahal ekonomi Indonesia bergantung pada komoditas strategis seperti sawit. Kondisi ini semakin diperberat oleh pemberlakuan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuat daya saing sawit menurun.

Sarbumusi mendorong pemerintah mempermudah perizinan dan kepastian hukum untuk mendorong investasi domestik yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Selain itu, Konfederasi Sarbumusi meminta pemerintah memperkuat jaminan sosial yang berangkat dari realitas di lapangan. ■

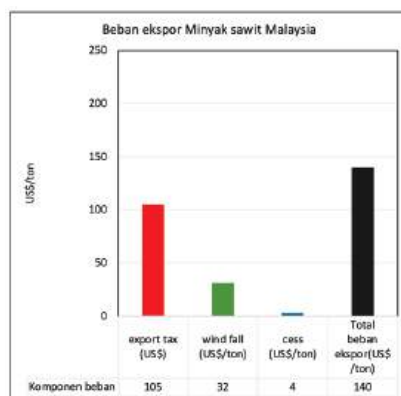


## TAHUN SULIT INDUSTRI SAWIT

**Dengan tarif PE, beban yang harus ditanggung dunia usaha semakin tinggi.**

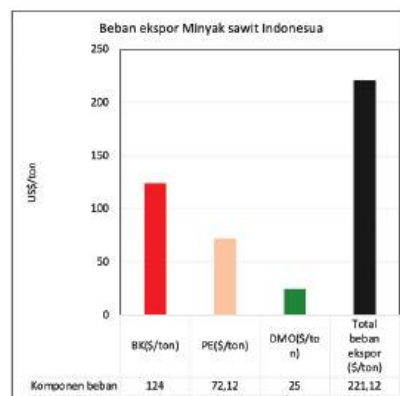
Tahun 2025 baru setengah perjalanan. Tapi, tantangan yang dihadapi industri sawit terasa semakin berat. Tantangan dari dalam maupun luar negeri datang silih berganti di tengah permintaan minyak sawit yang meningkat. Upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh industri sawit harus penuh perhitungan dan mempertimbangkan banyak aspek agar tidak menjadi bom waktu bagi industri andalan ekspor nonmigas Indonesia ini.

Diawali terbitnya Kemenhut No. 35 Tahun 2025 pada 6 Februari 2025 industri kelapa sawit dikejutkan oleh gerak cepat Satgas PKH yang menyita kebun sawit yang terindikasi masuk



kawasan hutan berdasarkan Pasal 110A UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sekitar 1,2 juta hektar lahan sawit disita oleh negara. Kondisi ini memicu kekhawatiran bagaimana nasib tanaman dan karyawan kebun-kebun yang disita. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah target produksi sawit yang tidak tercapai.

Kekhawatiran tentang kesinambungan pengelolaan kebun sawit yang sedang berproduksi ini juga



tidak lepas dari terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025. Pada prinsipnya GAPKI merespon baik langkah pemerintah menertibkan kawasan hutan. "Kami harap proses ini selesai supaya kita bisa fokus penuh meningkatkan produktivitas," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Selain itu, lahan yang masih diverifikasi diharapkan tidak diambil tindakan lebih dulu sampai ada keputusan pasti tentang perizinannya.

Berdasarkan laporan Satgas PKH, hingga akhir Maret 2025 tercatat 1.001.674 hektare lahan telah dikuasai pemerintah, 710.057 hektare sudah melalui proses verifikasi administratif, 467.136 hektare telah dilakukan verifikasi lapangan, 221.868 hektare telah diserahkan ke PT Agrinas sebagai BUMN yang mengelola kebun sawit hasil sitaan Satgas PKH. Sedangkan 216.997 hektare dalam proses penyerahan ke Agrinas. Sampai Juni 2025 tidak kurang dari 1,2 juta hektar kebun sawit yang dikelola Agrinas.

Tantangan besar kembali menerpa industri sawit. Kali ini datangnya dari seberang, Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor menjadi 32%. Ini pukulan berat karena daya minyak sawit Indonesia diprediksi turun akibat kenaikan harga di pasar dunia. “Ini hambatan besar kita,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam *Bisnis Indonesia Forum* dengan tema *Sembelit Industri Sawit, Masihkah Prospektif Jadi Penopang?* di Jakarta, 24 Juni 2025.

Malaysia sebagai kompetitor utama Indonesia di pasar CPO dunia hanya dikenakan tarif 24% oleh Amerika. Akibatnya beban ekspor sawit Indonesia meningkat mencapai US\$ 221,12 per ton setelah pemerintah menaikkan Pungutan Ekspor (PE) dari 7,5% menjadi 10% sejak 17 Mei 2025. CPO Indonesia yang akan diekspor dikenakan beban antara lain *Domestic Market Obligation* (DMO), pungutan ekspor (PE), dan bea keluar (BK).

Menurut Mukti Sardjono, penurunan daya saing CPO Indonesia dapat dibandingkan dengan beban industri sawit Malaysia sebagai pesaing utama Indonesia. Total beban industri sawit Malaysia hanya US\$140 per ton. Dari angka ini terlihat daya saing minyak sawit Indonesia melemah.

Dengan tarif PE, beban yang harus ditanggung dunia usaha semakin tinggi. Harga CPO yang semakin mahal, daya saing produk sawit Indonesia dikhawatirkan menurun.

Daya saing minyak sawit Indonesia sebenarnya memiliki peluang menarik ketika memasuki tahun 2025 ketika terjadi keseimbangan kembali harga



minyak nabati, yang ditunjukkan dengan menurunnya harga minyak sawit di bawah harga minyak *rapeseed* dan *sunflower*. Namun ketegangan politik dan perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, India-Pakistan, ditambah Iran-Israel mendorong harga energi meningkat kembali.

Peningkatan harga energi global tentunya sangat berpengaruh pada minyak sawit Indonesia. Terutama akibat ketegangan India-Pakistan sebagai pasar tradisional dan importir utama minyak sawit Indonesia.

Salah satu hal yang memberikan angin segar adalah konflik antara India dan Pakistan yang sempat mengarah pada perang fisik mulai mereda. Harapannya pasar ekspor tidak terlalu terdampak.

Hingga akhir Juni 2025 ekspor minyak sawit berlangsung normal. Ekspor CPO dan produk olahannya sepanjang April 2025 turun 39%, hanya mencapai 1,77 juta ton. Padahal, pada Maret 2025, volume ekspor masih berada di angka 2,87 juta ton.

Penurunan paling tajam tercatat pada produk olahan minyak sawit, yang hanya angka 1,24 juta ton, turun 41% dari bulan sebelumnya yang masih berada di 2,12 juta ton.

Meski demikian, tantangan paling krusial justru datang dari dalam negeri yakni soal regulasi dan iklim usaha. Keterlibatan 37 instansi yang mengurus kelapa sawit sering menyebabkan tumpang tindih

regulasi.

“Ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks membuat pelaku usaha kesulitan bergerak secara efisien,” kata Mukti Sardjono. GAPKI mengusulkan perlunya badan tunggal yang memiliki kewenangan penuh mengurus sektor sawit. Hal ini sejalan dengan temuan Ombudsman RI dalam kajian tentang tata kelola sawit di Indonesia.

Dalam menghadapi beragam tantangan ini, GAPKI berfokus pada peningkatan produktivitas melalui beragam upaya antara lain inovasi bibit tahan ganoderma, pembaruan serangga penyerbuk, dukungan program PSR, hingga sertifikasi ISPO untuk memenuhi tuntutan pasar global seperti Uni Eropa yang menerapkan regulasi EUDR. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jalur kemitraan terus dikembangkan. Begitu juga dengan sertifikasi ISPO sesuai ketentuan terbaru yakni Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang sertifikasi ISPO.

Terkait ISPO GAPKI mengusulkan dibentuk Pelaksana Harian Komite ISPO karena ISPO saat ini berada di bawah koordinasi empat menteri koordinator. “Agar koordinasi di lapangan lebih mudah,” kata Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat. GAPKI mengapresiasi perluasan skema pembiayaan ISPO yang mencakup pembuatan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) hingga audit. ■

## SAWIT INDONESIA DAN MALAYSIA PUNYA PROBLEM SERUPA

**Penyebab utamanya hampir sama, usia tanaman sudah tua dan terlambat melakukan peremajaan (replanting).**

Sebagai negara utama penghasil minyak sawit dunia, Indonesia dan Malaysia punya problem yang sama, yakni penurunan produktivitas. Indonesia menghasilkan 52,7 juta ton CPO pada 2024, turun 3,8% dibandingkan 2023. Malaysia juga mengalami hal serupa dengan produksi tahunan rata-rata 17-18 juta ton. Penyebab utamanya hampir sama, usia tanaman sudah tua dan terlambat melakukan peremajaan (replanting).

Temuan ini terungkap dalam pertemuan antara GAPKI dan Jullian McGill, Managing Director Glenauk Economics di Kantor GAPKI, 22 Mei 2025. GAPKI diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Kabid Riset & Pengembangan Dwi Asmono, Ketua Bidang Sustainability, dan Tim Sekretariat GAPKI. Pertemuan ini membahas strategi peningkatan produktivitas tanaman sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati domestik maupun global.

Selain tentang *replanting*, GAPKI juga mengungkapkan pengelolaan lahan sawit petani yang belum



sepenuhnya menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*), terutama dalam hal pemupukan, penggunaan bibit yang tidak tersertifikasi. Akses terhadap sumber benih pada dasarnya terbuka, tapi harganya mahal jika dipesan dalam jumlah kecil. Skala usaha petani terlalu kecil sehingga berdampak pada pemeliharaan kebun yang tidak optimal.

Untuk meningkatkan produktivitas, GAPKI mengusulkan introduksi serangga penyerbuk, peningkatan sumber daya genetik, dan mekanisasi. Satu hal yang menjadi catatan GAPKI adalah banyaknya instansi yang terlibat dalam pengurusan komoditas sawit sehingga kerap terjadi tumpang tindih kebijakan. Dampak turunannya adalah ekonomi biaya tinggi yang berpengaruh pada daya saing CPO Indonesia.

Kepada Jullian McGill, GAPKI menyampaikan upaya membantu lahan petani sawit agar memiliki

sertifikat ISPO. Bukan hal mudah melakukan sertifikasi perkebunan rakyat, namun harus tetap diupayakan sebagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia tanggal 19 Maret 2025.

Sementara itu, Jullian McGill menegaskan bahwa *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) tidak mengurus semua hal tentang sawit. Misalnya, tentang tenaga kerja, urusan imigrasi, dan lainnya. MPOB hanya fokus pada beberapa bagian saja. Dia tidak menampik kalau luasan lahan datanya belum akurat.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh posisi komoditas sawit belum menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan Malaysia karena pondasi pembangunan negeri jiran ini bukan sektor pertanian. ■



# KOLABORASI GAPKI-SPKS DORONG KEMANDIRIAN EKONOMI PETANI

*GAPKI menyambut positif sebagai komitmen membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan.*



Kolaborasi strategis antara korporasi dan petani kelapa sawit menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi petani kelapa sawit. Sinergi keduanya memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong sawit berkelanjutan. Berangkat dari harapan ini, GAPKI dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menandatangani MoU untuk memperkuat kolaborasi mendorong kemandirian ekonomi petani sawit.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Umum SPKS Sabarudin di Kantor Pusat GAPKI di Jakarta pada 17 Juni 2025. SPKS memiliki 76.000 anggota di 22 kabupaten di 11 provinsi seperti pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selama ini aktif memberikan pelatihan praktik pertanian berkelanjutan, memperkuat koperasi petani, serta memfasilitasi kemitraan antara petani dan perusahaan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyambut positif kesepakatan

ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. Apalagi keberhasilan industri tidak dapat dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok komoditas ekspor andalan Indonesia ini.

Karena itu, GAPKI dan SPKS bersepakat saling mendukung penguatan kapasitas para petani, peningkatan kelembagaan koperasi, serta mendorong kemitraan yang berkeadilan dan transparan antara koperasi petani dan perusahaan. MoU ini pondasi awal mewujudkan program konkret yang membantu kelembagaan petani sawit lebih kuat, mandiri secara ekonomi, dan mampu menjawab tantangan global, termasuk tuntutan keberlanjutan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan komitmen GAPKI mendukung SPKS dalam memperluas sertifikasi ISPO dan program PSR serta memperkuat koperasi sebagai fondasi kemandirian ekonomi

petani. Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha dan petani dapat bersinergi secara setara dalam membangun masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengapresiasi keterbukaan GAPKI menjalin kemitraan dalam memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional. Hal ini penting karena sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola petani, menunjukkan kontribusi signifikan kelompok ini terhadap industri.

Sabarudin menegaskan komitmen SPKS terhadap sertifikasi ISPO dan PSR. Meskipun ada sejumlah kendala, SPKS berharap kolaborasi dengan GAPKI menghadapi tantangan ini dan petani terhindar dari ketergantungan pada tengkulak akibat lemahnya akses pasar langsung. Karena itu, MoU ini langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan. ■



## GAPKI BERI MASUKAN BUKU SAWIT TERBITAN LEMHANNAS

***GAPKI membantu memberikan beberapa dan informasi yang dibutuhkan.***

**G**APKI memberikan sejumlah masukan kepada Deputy Lemhannas bidang Kajian Strategik, Prof. Dr. Reni Mayerni yang sedang menyiapkan penerbitan buku berjudul *Sawit Indonesia dalam Konstruksi Peradaban Dunia*. Masukan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam *breakfast meeting* bersama Prof. Dr. Reni Mayerni di kantor Lemhannas pada 26 Mei 2025. GAPKI diminta memberikan masukan sebelum diterbitkan oleh Lemhannas.

Beberapa masukan yang disampaikan GAPKI antara lain pembaruan data dalam negeri maupun luar negeri sebaiknya sampai tahun 2023. GAPKI membantu memberikan beberapa data yang dibutuhkan untuk pembaruan buku ini. Selain itu, GAPKI juga menjelaskan pentingnya lembaga khusus yang mengelola industri sawit sejak *on farm* sampai *off farm*.

Tujuannya supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang berpotensi

terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha.

Dalam catatan GAPKI, sampai saat ini ada 37 institusi yang terlibat dalam urusan kelapa sawit sehingga menyebabkan tumpang tindih regulasi dan ekonomi biaya tinggi. Padahal sawit adalah komoditas strategis untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri seperti ketahanan pangan dan kemandirian energi. Kehadiran lembaga khusus ini diharapkan mendorong peran industri sawit semakin signifikan dalam program-program pemerintah.

Dalam diskusi ini, GAPKI juga menyampaikan beberapa hal terkait penyelesaian lahan sawit yang teridentifikasi dalam kawasan hutan dan Implementasi Perpres No.5 tahun 2025 tentang PKH. Terkait dengan laporan Satgas Tata Kelola Industri Sawit (sesuai Keppres No.9 tahun 2023) dengan Satgas PKH (sesuai Perpres No. 5 tahun 2025) perlu ada kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang telah menyelesaikan kewajiban melalui Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah bahwa lahan HGU dan SHM semestinya dikeluarkan dari ketentuan masuk kawasan hutan. Selain itu, keberlanjutan pengelolaan lahan yang dikuasai kembali oleh negara dikhawatirkan tidak dapat memenuhi sertifikasi ISPO maupun RSPO karena lahan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan. Efeknya ada potensi penurunan produksi, karena pengelolaan lahan tersebut dikhawatirkan belum sesuai standar teknis.

Dalam pandangan GAPKI, penguatan kawasan hutan seharusnya mengacu kepada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 yang melalui empat proses, yaitu: penunjukkan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Dasar hukum penguatan ini diharapkan menjadi solusi terbaik. ■



# GAPKI DAN TANZANIA KEMBANGKAN SERANGGA PENYERBUK SAWIT

**Awalnya ada 7-8 spesies serangga penyerbuk yang menjadi bahan kajian. Namun, yang terpilih tiga.**

Introduksi serangga penyerbuk merupakan salah satu metode meningkatkan produktivitas tanaman sawit yang dilakukan di Indonesia sejak 1983. Proses introduksi kembali dilakukan pada Agustus 2024 dengan dibentuk Konsorsium Elaeidobius, sesuai nama serangga penyerbuk. Perkembangan introduksi ini menjadi bagian dalam audiensi antara GAPKI dan Duta Besar Tanzania di Indonesia, Macocha Tembele di Jakarta pada 26 Mei 2025.

Dalam audiensi ini, Dubes Tanzania didampingi oleh Tanzania Agricultural Research Institute (TARI) sebagai mitra kegiatan introduksi serangga penyerbuk di Indonesia. Sedangkan GAPKI diwakili oleh Waketum II Susanto, Kabid Riset & Pengembangan Dwi Asmono, dan Direktur Eksekutif Mukti Sardjono. Program ini dijalankan oleh Konsorsium Elaeidobius yang terdiri Ditjenbun, BPDP, GAPKI, RPN PIPPSI, PEI dan lain-lainnya.

Menurut Dwi Asmono, serangga penyerbuk banyak terdapat di beberapa negara Afrika. Tapi, Tanzania dipilih karena negara ini ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit. GAPKI mendukung dan bersepakat untuk melakukan tukar kemampuan dan keterampilan dalam pengembangan



perkebunan kelapa sawit. Dukungan ini dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GAPKI dan TARI yang ditandatangani pada November 2024.

Tanzania adalah salah satu negara yang dapat mengembangkan tanaman kelapa sawit selain Nigeria, Kamerun, dan beberapa negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Tanzania, lahan perkebunan sawit di negaranya masih 13.736 hektar. Lahan ini merupakan cikal bakal pengembangan kelapa sawit di Tanzania.

Dwi Asmono mengatakan awalnya ada 7-8 spesies serangga penyerbuk

yang menjadi bahan kajian. Namun, yang terpilih tiga yakni *Elaeidobius Camerunicus*, *Elaeidobius Subvittatus*, dan *Elaeidobius Plaggiatus* yang diintroduksi ke Indonesia. Masing-masing spesies membawa 2.000 indukan ke Indonesia sehingga total ada 6.000 indukan. Dari total indukan diharapkan berkembang menjadi 800 ribu hingga 1 juta serangga penyerbuk yang akan didistribusikan ke provinsi sentra sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain mengadakan audiensi, TARI juga mengadakan kunjungan ke SMART Research Institute untuk melihat perkembangan penelitian yang berkaitan dengan kelapa sawit. Kunjungan pada 30 Mei 2025 ini bertujuan melihat perkembangan introduksi serangga penyerbuk. Salah hal menarik dari pengembangan serangga penyerbuk adalah dampak suhu ekstrem pada serangga penyerbuk dalam berbagai kondisi selama 14 hari. ■



## DEDIKASI SAWIT TANPA PEKERJAANAK, GAPKI RAIH PAACLA AWARD 2025

**Pada 2025 masih ada 138 juta pekerja anak, 61% sebaran ada di perdesaan.**

Komitmen dan dedikasi GAPKI dalam menghapus pekerja anak dari industri sawit semakin diakui oleh berbagai kalangan. Salah satunya oleh PAACLA (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture*). PAACLA adalah platform kolaboratif yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ BAPPENAS bersama sejumlah *stakeholders* dalam penanggulangan pekerja anak di perdesaan pertanian.

Pengakuan atas dedikasi dan komitmen GAPKI diwujudkan dalam PAACLA Award 2025 yang diserahkan secara simbolis kepada Ketua



Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih.

Apresiasi diberikan bersamaan dengan peringatan *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak* (HDMPA) di Jakarta pada 12 Juni 2025. GAPKI dinilai memiliki komitmen kuat sekaligus dedikasi yang tinggi dalam penghapusan pekerja anak, terutama di sektor sawit.

Menurut Sumarjono Saragih, selama ini GAPKI melakukan upaya berkesinambungan dalam mempromosikan sawit tanpa pekerja anak. Upaya ini dilakukan secara sistematis sejak 2021 tanpa jeda sehingga programnya konsisten. Hal yang normatif adalah sawit tanpa pekerja. Tapi, GAPKI melakukan lebih yakni sawit ramah anak. Anggota GAPKI menyediakan akses dan fasilitas yang layak untuk pendidikan, kesehatan, *day care* dan prasarana lainnya.

Sumarjono Saragih mengatakan sebagai sektor di perdesaan, sawit banyak mendapatkan tekanan tentang isu pekerja anak. Perusahaan sawit mematuhi regulasi yang melarang pekerja anak. Secara kolaboratif,

GAPKI berinisiatif berkampanye dan membagikan praktek baik melalui seminar, lokakarya dan publikasi Buku Panduan *Sawit Indonesia Ramah Anak*. Sejak 2024 publikasikan *Sawit Indonesia Ramah Anak* dilakukan lewat video sehingga semua ekosistem industri sawit di perdesaan memahami pesan kampanye ini.

Dalam catatan ILO, pada 2025 masih ada 138 juta pekerja anak, 61% sebaran pekerja anak ada di perdesaan. Karena itu, dunia berpacu menghapus keterlibatan pekerja anak dalam rantai ekonomi.

Dalam lima tahun ini ada penurunan jumlah pekerja anak sekitar 20 juta orang. Indonesia mencapai kemajuan melalui sejumlah program yang digagas pemerintah, swasta dan elemen lainnya. Ada peta jalan mengakhiri pekerja anak.

Sawit ramah anak telah dirancang menjadi salah satu petajalan menuju generasi Indonesia Emas 2045. GAPKI sudah dan akan terus bergerak. GAPKI sendiri tidak cukup sehingga perlu upaya lebih masif dan kolaboratif bersama pemerintah pusat dan daerah. ♦



# CPOPC-GAPKI PERKUAT POSISI GLOBAL MINYAK SAWIT

*Transisi kepemimpinan, Izzana Salleh dipercaya jadi Sekretaris Jenderal CPOPC.*

**P**erkembangan pasar minyak nabati dunia dan industri minyak kelapa sawit di negara-negara penghasil minyak sawit menjadi tema utama diskusi antara CPOPC dan GAPKI di Jakarta pada 20 Mei 2025. Delegasi CPOPC dipimpin oleh Sekjen CPOPC Rizal Affandi Lukman dan Deputi Sekjen Datuk Nageeb Wahab serta Izzana Salleh dan Musdhalifah Machmud. GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Kabid Hubungan Luar Negeri M. Fadhil Hasan, Wasekjen Lolita Bangun, dan Direktur Eksekutif Mukti Sardjono.

Dalam pertemuan ini, Rizal Lukman juga menyampaikan transisi kepemimpinan CPOPC di mana Izzana Salleh mengantikan dirinya sebagai Sekjen CPOPC untuk masa jabatan Juni 2025 sampai Mei 2028. Musdhalifah Machmud mendampingi Izzana sebagai Wakil Sekjen. Izzana adalah tokoh lintas sektor dengan latar belakang kuat di kebijakan publik, kepemimpinan bisnis, dan advokasi global. Ia lulusan Harvard Kennedy

School, Imperial College London, dan California State University dan punya jabatan strategis di *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC).

Dalam diskusi ini, Rizal Lukman memaparkan peran CPOPC selama tiga tahun terakhir antara lain mendapat status pengamat di ECOSOC PBB, memungkinkan CPOPC menyuarakan pendapat di *platform multilateral* tertinggi. CPOPC juga merilis *Sustainable Vegetable Oils Conference/ SVOC*), hingga membentuk Gugus Tugas Gabungan (*Joint Task Force/JTF*) bersama Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia terkait Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Selain itu, CPOPC juga melakukan pendekatan strategis di negara-negara konsumen seperti Uni Eropa, Inggris, India, Tiongkok, dan Pakistan untuk menangkal misinformasi dan mengadvokasi perdagangan berbasis sains dan transparansi. CPOPC juga aktif mendorong partisipasi generasi muda melalui program *#YoungElaeis Ambassadors* yang menjangkau lebih dari 20 negara.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengapresiasi langkah dan kolaborasi CPOPC yang terjalin selama ini, terutama pada fase

krusial seperti melawan penerepan EUDR. GAPKI merupakan organisasi yang secara berkesinambungan mendukung program CPOPC, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk kepentingan industri sawit. Beberapa kegiatan bersama juga dilaksanakan untuk mendorong sawit berkelanjutan dan membangun citra positif sawit di mata publik.

Sedangkan Izzana Salleh mengatakan CPOPC akan melakukan sejumlah langkah strategis antara lain memperkuat kolaborasi regional, menyelaraskan standar keberlanjutan, memperjuangkan hak-hak petani kecil dalam rantai nilai global. Ia berkomitmen terlibat lebih aktif dengan mitra di seluruh dunia, membangun kepercayaan melalui transparansi, sains. Ia berharap kolaborasi dengan GAPKI semakin ditingkatkan untuk memperkuat posisi sawit di pasar internasional. ■





## CERIA BERSAMA ANAK-ANAK KEBUN SAWIT

*Program SIRA terbukti memberi ruang yang leluasa bagi anak-anak untuk berkembang dan berkreasi.*

Lebih dari 300 anak dari desa-desa di sekitar kebun sawit ini unjuk kreativitas dalam perayaan *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak*. Mereka tidak hanya menari, mendongeng, menyanyi dan pantomime, atraksi lainnya. Bertempat di PT AMP Plantation di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 25 Juni 2025, mereka ingin juga bersuara dalam menentang pekerja anak. Kegiatan ini dihelat oleh GAPKI, PAACLA, dan GAPKI Sumatera Barat yang didukung oleh BPDP.

Kegiatan dengan tema *Cerita Bersama Anak-Anak Kebun Sawit* ini bagian dari promosi *Sawit Indonesia Ramah Anak* (SIRA) ke tingkat nasional dan internasional. Perayaan ini dihadiri para pemangku kepentingan di industri sawit, pengurus GAPKI Pusat, GAPKI Sumbar, Pemkab Agam, Pemprov Sumbar, hingga PT AMP Plantation sebagai tuan rumah. SIRA merupakan kegiatan inovatif yang dirancang GAPKI dalam mendorong

penghapusan pekerja anak di kebun sawit.

Ketua GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan dunia usaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan sektor perkebunan sawit bebas dari pekerja anak.

"Kita ingin perkebunan sawit menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi," katanya. SIRA adalah program yang tepat mewujudkan impian membebaskan pekerja anak dari industri sawit.

Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih mengatakan komitmen GAPKI dalam penghapusan pekerja anak sudah dilakukan dalam berbagai aksi. Selain promosi juga dilakukan aksi-aksi nyata di lapangan tentang larangan pekerja anak di kebun sawit. Anggota GAPKI yang mencapai 747 perusahaan telah berkomitmen tidak mempekerjakan anak-anak di berbagai lini usahanya.

Program SIRA diharapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 bersama sawit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam, Surya Wendri mengapresiasi langkah dan program GAPKI dalam penghapusan pekerja anak di industri sawit. "Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka harus tumbuh di lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka," kata dalam sambutan pembukaan kegiatan ini.

Menurut Surya Wendi, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun dunia usaha juga terlibat. Karena itu, promosi penghapusan pekerja anak seperti yang dilakukan GAPKI harus didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Program SIRA terbukti memberi ruang yang leluasa bagi anak-anak untuk berkembang dan berkreasi. ■



# GAPKI JAMBI SIAP TRANSFORMASI INDUSTRI SAWIT

**Ada 185 perusahaan sawit yang beroperasi di Jambi. Tapi, yang menjadi anggota GAPKI baru 37 perusahaan.**

Gubernur Jambi, Al Haris meminta GAPKI Cabang Jambi meningkatkan soliditas sehingga manfaat keberadaan organisasi semakin dirasakan oleh anggota dan perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKI. Permintaan ini disampaikan dalam pelantikan Pengurus GAPKI Jambi 2025-2030 di Swissbel Hotel, Jambi pada 8 Mei 2025. GAPKI Jambi dipimpin oleh Ryan Harry Supriyanto yang terpilih dalam Muscab GAPKI Jambi.

Selain Gubernur Jambi Al Haris, pelantikan pengurus GAPKI Jambi yang dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga dihadiri oleh Danrem 042/Gapu Brigjen Heri Purwanto, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jambi, dan semua unsur Forpominda Provinsi Jambi. Kehadiran mereka merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap eksistensi GAPKI Jambi.

Permintaan agar semua perusahaan sawit di Jambi bergabung dengan GAPKI juga disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Jambi

merupakan salah satu provinsi utama penghasil sawit di Indonesia. Ada 185 perusahaan sawit yang beroperasi di Jambi. Tapi, yang menjadi anggota GAPKI baru 37 perusahaan. Bernaung dalam organisasi akan memberikan dampak besar bagi perkembangan industri sawit di Jambi khususnya, dan Indonesia umumnya.

Menurut Eddy Martono, tantangan industri sawit yang semakin besar tidak boleh dihadapi secara parsial, namun harus komprehensif dan dilandasi kebersamaan. Apalagi tantangan industri sawit tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Ketidakpastian global yang sedang terjadi, harus direspon secara kolaboratif antara asosiasi, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luas.

Ketua GAPKI Jambi, Ryan Harry Supriyanto mengatakan GAPKI Jambi berkomitmen untuk mendorong transformasi industri kelapa sawit yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berorientasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan industri



dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat Jambi. Sinergi dengan seluruh pihak akan ditingkatkan, termasuk mengajak perusahaan lain menjadi anggota GAPKI Jambi.

Menurut Ryan Harry Supriyanto, pelantikan ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi GAPKI Jambi dalam memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi penting karena industri sawit akan memasuki era pertanian modern di pemerintah mendorong pengembangan kebun kelapa sawit terintegrasi dengan komoditas lainnya seperti program tumpang sari padi gogo di perkebunan sawit. ■





## PUNGUTAN EKSPOR NAIK, DAYA SAING TURUN

***GAPKI mengkhawatirkan potensi penurunan permintaan dari pasar tradisional seperti India dan Pakistan.***

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono meminta pemerintah menunda kenaikan tarif Pungutan Ekspor (PE) dari 3-7,5% menjadi 4,75-10% seperti tertuang dalam PMK No. 30 Tahun 2025 dan berlaku mulai 17 Mei 2025. Permintaan ini disampaikan saat membuka Andalas Forum V Tahun 2025 di SKA Co Ex Pekanbaru pada 22 Mei 2025. Forum ini diikuti oleh 700 peserta dari kalangan pengusaha anggota GAPKI, perwakilan petani, dan pemerintah setempat.

Andalas Forum V selama dua hari ini mengangkat tema *Hambatan, Tantangan, dan Sinergi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan*. Forum ini menjadi ajang strategis merumuskan solusi bagi industri sawit dalam menghadapi tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kegiatan ini GAPKI Cabang Riau bertindak sebagai tuan rumah yang akan dilanjutkan oleh GAPKI Sumatera Selatan di tahun berikutnya.

Permintaan penundaan kenaikan PE ini tidak lepas dari konflik geopolitik antara India dan Pakistan yang berdampak pada permintaan minyak sawit. Dua negara ini dikenal sebagai pengimpor utama CPO dari Indonesia. Kondisi ini diharapkan jadi pertimbangan pemerintah dalam

kenaikan pungutan ekspor produk minyak sawit.

Selain faktor India-Pakistan, kenaikan tarif impor Amerika Serikat menjadi 32% merupakan pukulan lain yang membuat daya CPO Indonesia menurun karena harga kurang kompetitif. Malaysia sebagai kompetitor utama dikenakan tarif impor 24%. Keduanya memang masih dalam tahap penundaan hingga Juli, tetapi tetap menjadi ancaman bagi ekspor Indonesia, terutama ekspor ke pasar Amerika Serikat yang selama ini didominasi Indonesia.

Menurut Eddy Martono, minyak sawit

Indonesia yang akan diekspor dikenakan beberapa beban antara lain *Domestic Market Obligation* (DMO), pungutan ekspor (PE), dan bea keluar (BK). Total beban yang ditanggung industri mencapai US\$ 221/ton. Dengan tarif pungutan ekspor terbaru, beban yang harus ditanggung dunia usaha semakin tinggi. Harga CPO yang semakin mahal, daya saing produk sawit Indonesia dikhawatirkan menurun.





Selain tekanan yang berasal dari tarif, potensi tekanan lainnya masih mengancam. GAPKI mengkhawatirkan potensi penurunan permintaan dari pasar tradisional seperti India dan Pakistan. Konflik politik berkepanjangan yang berubah menjadi ketegangan fisik antara kedua negara disebut berdampak pada lambatnya aktivitas pembelian minyak sawit dan turunannya. Dua negara ini termasuk importir minyak sawit Indonesia yang cukup besar.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda gencatan senjata permanen antara India dan Pakistan. Padahal pelaku pasar dan dunia usaha berharap kedua negara bertetangga ini meredakan konflik dan mendorong perdamaian. Kondisi yang tidak stabil seperti sekarang tentunya membuat pasar menahan diri untuk membeli minyak sawit.

Dirjen Perkebunan Kementan yang mewakili Menteri Pertanian Amran Sulaiman,

Heru Tri Widarto mengharapkan Andalas Forum V menjadi wadah untuk menyampaikan masukan konkret bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan industri. Salah masukan yang diperlukan terkait dengan konflik India-Pakistan dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat, yang berpotensi menghambat ekspor sawit nasional.

Sedangkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahril Abdi yang mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid mengapresiasi GAPKI Cabang Riau yang mengadakan forum strategis ini. Apalagi Riau merupakan provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Harapannya forum ini melahirkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. ■

## INOVASI DAN PRODUK SAWIT BERKELANJUTAN

Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono menegaskan sebagai tuan rumah Andalas Forum V Tahun 2025 merupakan kegiatan strategis untuk pelaku industri sawit, pemerintah, petani hingga akademisi dan mahasiswa. Selain kajian tentang masa depan sawit, forum ini juga menampilkan sejumlah pencapaian GAPKI dalam beberapa waktu terakhir. Pencapaian tidak hanya kinerja organisasi, namun juga inovasi dan produk sawit unggulan.

Ketua Panitia Forum Andalas V, Dede Putra Kurniawan mengatakan inovasi teknologi dan produk sawit unggulan merupakan salah satu daya tarik yang ditampilkan dalam forum ini untuk publik. Inovasi teknologi yang dikembangkan perusahaan besar anggota GAPKI juga dipamerkan di forum ini. Selain itu, GAPKI juga berbagi informasi sejumlah hal penting tentang industri sawit antara lain:

- Implementasi ISPO dan pencapaian ISPO oleh anggota GAPKI.
- Upaya GAPKI dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan.
- Edukasi dan partisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Perlindungan terhadap HAM bagi pekerja dengan menerbitkan *Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan, Sawit Indonesia Ramah Anak, dan Padu Perkasa, Panduan Pekerja Harian di Kebun Kelapa Sawit.*



## KONTRIBUSI GAPKI PADA PENURUNAN EMISI GRK

**Kemitraan GAPKI-WRI Indonesia untuk mengoptimalkan kontribusi Indonesia pada rantai pasok hijau kelapa sawit global.**

Komitmen GAPKI terhadap rantai pasok hijau kelapa sawit global dan pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya lewat kerjasama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia sejak 2024. Kegiatan lanjutan antara GAPKI dan WRI kembali dilakukan pada 13 Juni 2025 di Jakarta. Dalam kegiatan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Sustainability, Bambang Dwi Laksono. Adapun WRI diwakili oleh Bukti Bagja, *Supply Chain and Livelihood Transformation Senior Manager WRI Indonesia* dan tim.

Pertemuan ini lanjutan acara serupa pada 10 Maret 2025 dimana GAPKI dan WRI Indonesia menyepakati program pemantauan dan perubahan penilaianutupan lahan, penilaian IKTL, pemantauan NKT, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), dan strategi menuju *net zero*. Kerjasama ini dijalankan melalui Kemitraan GAPKI-WRI Indonesia untuk *Mengoptimalkan Kontribusi Indonesia Pada Rantai Pasok Hijau Kelapa Sawit Global*.

Program ini berfokus pada pemantauan dan penilaian resiko perubahanutupan hutan dan lahan serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Hasil kerjasama ini diharapkan menjadi dasar perusahaan sawit di Indonesia untuk mengimplementasikan produksi sawit berbasis iklim dan mencapai *net-zero* target serta terbukanya peluang investasi hijau. Belakangan ini semakin banyak pembiayaan proyek hijau yang disalurkan ke berbagai pihak.

Bambang Dwi Laksono mengatakan



dalam menghadapi tuntutan pasar dan kebijakan pasar global, industri sawit Indonesia perlu memperkuat kapasitas teknis dalam pemantauanutupan lahan dan akuntansi emisi gas rumah kaca secara terintegrasi. Kolaborasi GAPKI dan WRI Indonesia cukup strategis menjawab kebutuhan ini melalui penguatan kapasitas dan penyelarasan metodologi yang komprehensif.

Kolaborasi GAPKI dan WRI dilakukan pada 2024 dalam pelatihan *Peningkatan Kapasitas Anggota GAPKI dalam Pemantauan Tutupan Lahan dan Penurunan Emisi Karbon* di Jakarta pada 1-2 Oktober 2024. Di pelatihan ini dikenalkan platform Global Forest Watch dan Global Forest Watch Pro yang dipakai oleh 900 pengguna di 45 negara, mencakup 60 juta hektar area produksi perkebunan, kehutanan dan

pertanian.

Kerjasama GAPKI dan WRI Indonesia ini diharapkan meningkatkan kesiapan anggota GAPKI dalam penilaian dan pemantauan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sesuai dengan peraturan dari pemerintah, pemantauan perubahanutupan hutan, inventarisasi GRK di *scope 1* sampai dengan 3, serta setting target menuju *net-zero*. Selain itu, dilakukan eksplorasi dan optimalisasi teknologi dalam penilaian perubahanutupan hutan dan lahan.

Dengan meningkatkannya kapasitas anggota GAPKI diharapkan sektor sawit diintegrasikan ke dalam kerangka implementasi NDC Indonesia dan memetakan strategi dekarbonisasi untuk membuka peluang mobilisasi finansial dalam rantai pasok hijau kelapa sawit global. ■

# GAPKI USULKAN PELAKSANA HARIAN KOMITE ISPO



***ISPO versi baru ditargetkan menjadi tools strategis untuk menjaga keberterimaan sawit Indonesia di pasar ekspor utama.***

Sejalan dengan terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang ISPO, GAPKI mengusulkan pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Abdul Aziz dalam diskusi yang digelar oleh Forwatan di Wisma Tani, Kementan, 4 Juni 2025. GAPKI dipercaya sebagai pembicara bersama Ratna Sariati (Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kementan dan Lila Harsyah Bakhtiar (Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian).

Pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO ini semata-mata untuk

mempercepat dan memperkuat fungsi teknis administratif pelaksanaan ISPO. Selain itu, keberadaan komite ini juga menjadi perbaikan atas struktur lama yang belum optimal.

Apalagi, komando pelaksanaan ISPO langsung di bawah Kemenko Perekonomian sehingga diperlukan eksekutor teknis harian agar implementasi Perpres No. 16 Tahun 2025 berjalan optimal. Regulasi terbaru ini mencakup sertifikasi ISPO kebun sawit, industri hilir sawit dan usaha bioenergy sawit.

Selama ini, sertifikasi ISPO berpedoman pada Permentan 38/2020 sebagai turunan dari Perpres 44 Tahun 2020. Dengan adanya

perpres yang baru, Kementan sedang menyiapkan aturan baru karena ada sejumlah perubahan. Perpres No. 16 Tahun 2025 membuka akses yang lebih luas bagi pekebun mendapatkan dananya. Pembiayaan ISPO dari pekebun dapat difasilitasi APBN, APBD, BPDP, dan lainnya seperti BPDP. Selain itu, perkebunan sawit diampu oleh Kementan, industri hilir di bawah Kemenperin, dan bioenergi diampu Kementerian ESDM.

Sertifikasi ISPO menjadi perhatian besar pemerintah untuk menjawab tuntutan global, baik di sektor hulu maupun hilir industri sawit. Kebijakan EUDR ditunda memberikan ruang yang cukup bagi industri sawit Indonesia merespon tuntutan pasar global.

Karena itu, ISPO mencakup aspek yang lebih lengkap dan menyeluruh. ISPO versi baru ditargetkan menjadi tools strategis untuk menjaga keberterimaan sawit Indonesia di pasar ekspor utama.

Saat ini, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16 juta hektar yang dikelola oleh perusahaan negara, swasta dan petani. Hingga awal 2025, baru sekitar 6,2 juta hektar yang sudah memiliki sertifikasi ISPO. Salah satu kendala sertifikasi ISPO adalah biaya. Masukan dari diskusi Forwatan ini diharapkan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh petani terkait akses informasi, akses pendanaan, hingga kapasitas teknis mengakses sertifikasi ISPO.

Selain kebun sawit, pemerintah akan fokus pada sertifikasi ISPO untuk 190 produk hilir sawit berdasarkan volume dan potensi pasar. ■





## GUBERNUR MINTA GAPKI KALBAR TINGKATKAN SINERGI

*GAPKI diminta memperluas jumlah keanggotaan di Kalimantan Barat.*

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak GAPKI Cabang Kalimantan Barat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi Pemprov Kalbar dan GAPKI Kalbar harus lebih ditingkatkan dalam mengelola potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

"Kita memiliki harapan khusus kepengurusan GAPKI Kalbar yang baru ini dapat bermitra aktif dengan pemerintah," kata Ria Norsan dalam sambutan pelantikan Pengurus GAPKI Kalbar 2025-2030 di Pontianak pada 12 Juni 2025. Selain Gubernur, pelantikan ini dihadiri juga oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Direktur Reskrim Polda Kalbar, Dekan Faperta Universitas Tanjungpura dan pengurus pusat GAPKI.

Kalimantan Barat merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia. Potensi besar ini cukup untuk menopang

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan daerah. Gubernur mendorong GAPKI Kalbar mengambil langkah konkret melalui penguatan kemitraan dengan petani, pendampingan sertifikasi ISPO, optimalisasi program CSR serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah terpencil.

Gubernur Ria Norsan mengimbau pengusaha sawit bergabung di GAPKI untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi. Apalagi Pemprov Kalbar telah berkomunikasi dengan Pelindo untuk bongkar muat CPO akan dipasang di Pelabuhan Kijing. "Ini memperkuat infrastruktur distribusi sawit dan mendorong PAD," katanya.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan selamat kepada GAPKI Kalbar 2025-2030 yang dipimpin oleh Aris Supratman. GAPKI Kalbar diminta menyiapkan program yang sejalan AD/ART Hasil Munas GAPKI di Bali yang telah diperbaharui. Ketua



Umum GAPKI meminta GAPKI Kalbar untuk sigap dalam advokasi masalah kebun terindikasi masuk kawasan hutan. Advokasi GAPKI untuk anggota merupakan salah satu keuntungan menjadi anggota GAPKI.

Menurut Eddy Martono, sinergi dengan pemerintah daerah merupakan faktor mutlak yang harus dilakukan karena GAPKI adalah mitra pemerintah.

Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar kebun sawit menjadi nilai tambah bagi keberadaan GAPKI di daerah penghasil sawit.

Ketua GAPKI Kalbar Aris Supratman menyatakan komitmen untuk memperkuat organisasi dan memperluas keanggotaan GAPKI di Kalbar. Harapannya perusahaan anggota GAPKI di Kalbar semakin meningkat. Saat ini, tercatat ada 78 perusahaan sawit yang menjadi anggota GAPKI Kalbar dari total

sekitar 370 perusahaan yang beroperasi di Kalbar.

Jumlah ini setara 20 persen dari total jumlah perusahaan sawit di Kalbar. ■

